

## PERAN BELANJA MODAL DALAM PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG)

Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali, Jl. Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung-Bali –  
80364, Telp. 0361-701981 (hunting) Fax. 0361-701128 email: dwi.pratiwi@yahoo.co.id

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ekpenditure modal dan kinerja keuangan di Buleleng. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang transparan dan akuntabel di Buleleng. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng dengan objek yang diteliti adalah belanja modal dan kinerja di bidang keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi dengan menggunakan kombinasi *time series* yaitu melalui observasi, studi literatur, serta wawancara mendalam dengan pemerintah daerah. Hasilnya menunjukkan Buleleng telah mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kabupaten Buleleng dengan penyerapan kenaikan dari tahun 2010 sampai 2015. Dalam hal rasio kemandirian Kabupaten Buleleng pada tahun 2013 sangat bergantung pada dana dari pusat, sehingga memberikan rasio terkecil tahun ini. Dalam hal efektivitas rasio, Buleleng pada tahun 2015 memiliki kemampuan untuk mewujudkan daerah yang direncanakan berdasarkan target yang ditetapkan oleh potensi nyata daerah. Dalam hal rasio efisiensi, pengeluaran Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 tidak sesuai dengan keinginan dan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Dalam hal rasio aktivitas Kabupaten Buleleng memiliki aktivitas paling banyak yang dicapai pada tahun 2015. Dalam hal tingkat pertumbuhan, kemampuan daerah kecamatan Buleleng menjaga dan meningkatkan sumber pendapatan (rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan total pendapatan) terbaik dicapai pada tahun 2012.

**Kata kunci;** Belanja modal, pertumbuhan, kinerja keuangan daerah

**Abstract:** The research is aimed to determine the relationship of capital expenditure and financial performance in Buleleng. This research is expected to provide practical implications in the management of public sector finances are transparent and accountable in Buleleng. This research was conduct in Buleleng district with the object studied in capital expenditure and performance in the field of finance. The analysis technique used is regression by using a combination of time series is in getting through observation, study of literature, as well as in-depth interview with local government. The result showed Buleleng has been able to provide welfare to society Buleleng regency with the absorption of the increase from 2010 to 2015, in term of independence ratio Buleleng regency in 2013 is very dependent on funds from the center so as to provide the smallest ratio this year, in terms of the ratio effectiveness, Buleleng in 2015 has the ability to realize revenues planned area as compared to the target set by the real potential of the region, in terms of efficiency ratios, Buleleng regency expenditure in 2015 is not as intended and is not in accordance of what was planned, in terms of the ratio of the activity of the Buleleng district have the most activity achieved in 2015, and in terms of growth rate, the ability of the local government distric of Buleleng in maintaining and increasing the sources of income (the ratio of growth in revenue and growth ratio of total revenue) best achieved at in 2012.

**Keywords;** capital expenditure, growth, financial performance area

### PENDAHULUAN

Aktivitas pembangunan dan pemerintahan di daerah tentu tak dapat dipisahkan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan fiskal yang besar di era desentralisasi sangat menentukan

struktur anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah (APBD), sehingga dari substansi sebuah APBD dapat dilihat upaya atau keseriusan suatu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, seberapa besar potensi penerimaan yang akan digali, ke arah mana belanja daerah itu difokuskan, atau dari mana defisit anggaran akan dibiayai. Melalui struktur dan porsi belanja daerah dapat diketahui kecenderungan belanja daerah, apakah cenderung pada penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur pemerintahan atau cenderung pada penyelenggaraan pembangunan daerah. Perilaku pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah akan berpengaruh dalam proses penganggaran daerah. Struktur anggaran daerah mencerminkan besar kecilnya upaya pemerintah daerah dalam pembangunan daerah, terutama jika melihat pada porsi belanja modal.

Dalam menyusun anggaran, pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif, karena pada umumnya penganggaran akan menghadapi masalah pengalokasian. Masalah pengalokasian ini terutama terkait dengan sumber daya. Tidak semua daerah kaya akan sumber daya dan potensi, akibatnya dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008).

Persentase rasio belanja modal seluruh provinsi di Indonesia masih di bawah 40,0% dan rata-rata agregat provinsi, kabupaten dan kota sebesar 23,41%, dari jumlah tersebut, sebanyak 20 provinsi masih memiliki rasio di bawah rata-rata, sedangkan 13 provinsi berada di atas rata-rata. Selain itu, provinsi yang memiliki rasio terendah adalah Prov. DI. Yogyakarta dengan angka sebesar 12,2% sedangkan rasio tertinggi terdapat pada Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 39,9%. Kondisi di atas menunjukkan sebagian besar provinsi di Indonesia masih menganggarkan belanja modal dengan porsi yang kecil, yaitu di bawah 24,0%. Itu berarti bahwa sebagian daerah masih belum memberikan perhatian yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonominya (DJPK-Depkeu, 2012). Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah belum menempatkan belanja modal sebagai aspek krusial dalam pembangunan daerah. Hal ini tercermin dalam struktur belanja daerah yang menunjukkan dominasi belanja pegawai dan porsi belanja modal yang kecil. Terdapat *gap* antara kebijakan desentralisasi untuk pembangunan dengan upaya pembiayaan pembangunan yang berasal dari keuangan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah hubungan belanja modal dan kinerja keuangan daerah Kabupaten Buleleng? Tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui hubungan belanja modal dan kinerja keuangan Kabupaten Buleleng.

Manfaat hasil penelitian yang dilakukan ini bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Sebagai informasi kepada publik dan manajemen Pemerintah Kabupaten Buleleng mengenai belanja modal dan kinerja keuangan daerah.
2. Sebagai informasi kepada publik dan manajemen pemerintah mengenai pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah.
3. Sebagai pedoman bagi peneliti lain untuk penelitian selanjutnya tentang kinerja keuangan daerah.

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2006:117). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan alokasi yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) maksimal dengan menggunakan biaya (*input*) yang

terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan alokasi penganggaran dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien. Penelitian Nasution (2010) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memberikan hasil bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja yang digunakan adalah dengan rasio upaya fiskal, yaitu Total Pendapatan Asli Daerah dibagi Total Anggaran Pendapatan Asli Daerah, yang mengindikasikan daerah-daerah tersebut terkadang tidak bisa mencapai Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini bisa terjadi, daerah tersebut tidak secara rasional dalam menyusun Anggaran PAD.

Menurut Halim (2001) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran. Penelitian Nasution (2010) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memberikan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Utara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan proses yang dilakukan secara bertahap, yakni dari perencanaan dan perancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, waktu penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penyajian hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yang berbentuk asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Seperti yang telah dijabarkan telaah pustaka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di provinsi Bali. Hasil yang diperoleh pada akhirnya dipakai dalam penentuan prioritas pendanaan daerah yang tertuang dalam APBD serta meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat.

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode:

1. Dokumentasi, metode ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan menganalisis informasi yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan atau bentuk-bentuk lain. Data diperoleh dari data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kotamadya di Propinsi Bali.
2. Observasi, metode ini adalah dengan langsung mengadakan kunjungan ke Kabupaten Buleleng untuk meminta data yang berhubungan dengan penelitian
3. Wawancara, metode ini dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dari pejabat Kabupaten Buleleng terkait belanja modal dan kinerja keuangan serta upaya-upaya meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat Buleleng.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan sebagainya (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah belanja modal dan pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka menunjang pelaksanaan belanja pembangunannya adalah dengan jalan mengusahakan untuk tetap meningkatkan pendapatan daerah, baik

dari hasil pajak, retribusi, penerimaan lain-lain, maupun bantuan-bantuan yang diterima dari pihak atasan. APBD Kabupaten Buleleng dalam tahun 2010 yang besarnya Rp 750.192.515.356,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 7.987.800.115,00 atau sebesar 1,08% jika dibandingkan dengan APBD pada tahun 2009 yang jumlahnya sebesar Rp 742. 204.715.241,00.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi/usaha dalam suatu daerah dalam satu periode tertentu yang dikenal dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng sebelum periode penelitian adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng pada tahun 2009 mencapai 6,10% mengalami peningkatan sebesar 0,24% jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 5,84%; kontribusi sektor pertanian dalam PDRB atas dasar harga berlaku dalam tahun 2009 mencapai 30,80 % lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 31,08 %; PDRB perkapita Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 sebesar Rp 10.569.761,20 meningkat sebesar Rp 1.217.763,05 dibandingkan dengan tahun 2008 yang besarnya Rp 9.351.998,15 sedangkan untuk harga konstan pada tahun 2009 sebesar Rp 5.168.247,29 meningkat sebesar Rp 246.813,59 dibandingkan dengan tahun 2008 yang besarnya Rp 4.921.433,70 .

Hasil analisis statistik deskriptif dari belanja modal dan kinerja keuangan adalah sebagai berikut. Belanja modal terbesar yang dikeluarkan oleh Kabupaten Buleleng adalah sebesar Rp 177.557.758.591,00 pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2011 Kabupaten Buleleng memiliki belanja modal terkecil sebesar Rp 77.507.953.901,00. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan pembangunan pada kabupaten Buleleng, walau dengan standar deviasi sebesar Rp 36.854.715.618,00. Angka penyimpangan ini berarti bahwa penyimpangan pengeluaran APBD untuk belanja modal dari tahun 2010 sampai tahun 2015 adalah sebesar Rp 36.854.715.618,00. Jika dibandingkan dengan rata-rata penyebaran pengalokasian APBD untuk belanja modal dari tahun 2010-2015 sangat kecil, di mana rata-rata belanja modal adalah sebesar Rp 137,824,332,549,00. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Kabupaten Buleleng sudah dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat Kabupaten Buleleng dengan penyerapan yang meningkat dari tahun 2010 sampai tahun 2015 dengan penyimpangan yang sangat kecil.

Apabila dilihat dari kinerja keuangan, rasio kemandirian terbesar terletak pada tahun 2013 sebesar 79,55% dan terkecil pada tahun 2013 sebesar 7,21%. Rasio ini mengartikan bahwa Kabupaten Buleleng pada tahun 2013 sangat bergantung terhadap dana dari pusat, sehingga memberikan rasio terkecil pada tahun ini, tetapi Kabupaten Buleleng dapat segera memperbaiki tingkat kemandiriannya di tahun berikutnya yaitu tahun 2014 dengan tingkat kemandirian terbesar pada periode pengamatan. Rasio efektivitas terbesar terletak pada tahun 2015 sebesar 2,52% dan terkecil pada tahun 2011 sebesar 1,11%. Rasio ini mengartikan bahwa Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 memiliki kemampuan dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, sehingga pada tahun 2015 pemerintah daerah Kabupaten Buleleng memiliki kemampuan dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling tinggi. Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dalam merealisasikan PAD paling rendah terjadi pada tahun 2011 yang terbukti dari pencapaian rasio efektifitas terendah. Rata-rata pencapaian rasio efektifitas sebesar 1,62% dengan standar deviasi sebesar 0,57%. Rasio efisiensi terbesar terletak pada tahun 2015 sebesar 0,40% dan terkecil pada tahun 2013 sebesar 0,04%. Rasio ini mengartikan bahwa Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 memiliki pengeluaran yang dibelanjakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memenuhi dari yang direncanakan. Rasio aktivitas terbesar untuk rasio belanja rutin terhadap APBD terletak pada tahun 2011 sebesar 1,46% dan rasio belanja pembangunan terhadap APBD terletak pada tahun 2011 sebesar 4,24%. Rasio aktivitas terkecil untuk rasio belanja rutin terhadap APBD terletak pada tahun 2015 sebesar 0,25% dan untuk rasio belanja pembangunan terhadap APBD terletak pada tahun 2015 juga sebesar 0,42%. Semakin kecil rasio aktivitas ini mengartikan bahwa pemerintah daerah semakin dapat

memprioritaskan alokasi dananya untuk belanja rutin maupun untuk belanja pembangunan secara optimal.

Rasio pertumbuhan terbesar untuk rasio pertumbuhan PAD terletak pada tahun 2012 sebesar 106,64%, rasio pertumbuhan total pendapatan terletak pada tahun 2014 sebesar 37,63%, rasio pertumbuhan belanja rutin daerah terletak pada tahun 2012 sebesar 39,75%, dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan terletak pada tahun 2012 sebesar 99,45%. Rasio ini mengartikan bahwa pemerintah daerah mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Hasil perhitungan rasio-rasio tersebut dapat dituangkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1 Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2010-2015**

Tahun	Rasio Aktivitas			RASIO PERTUMBUHAN							
	Rasio Kemandirian	Rasio efektivitas	Rasio Efisiensi	Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD	Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD	Rata rata Rasio Aktivitas	Persentase Pertumbuhan PAD	Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan	Persentase Pertumbuhan Belanja Rutin Daerah	Persentase Pertumbuhan Belanja Pembangunan	Rata-rata Rasio Pertumbuhan
2010	19.94	1.28	0.13	1.46	4.24	2.85	33.14	2.66	11.37	12.60	14.94
2011	16.72	1.11	0.14	1.07	3.75	2.41	31.05	10.00	30.79	16.04	21.97
2012	7.21	2.12	0.09	1.14	0.53	0.84	106.64	21.80	39.75	99.45	66.91
2013	79.55	1.54	0.04	0.99	0.71	0.36	11.18	10.54	14.32	5.91	10.49
2014	10.71	1.18	0.29	0.91	0.88	0.44	66.22	37.63	34.40	13.53	37.95
2015	11.80	2.52	0.40	0.25	0.42	0.21	-14.26	-18.23	-76.47	20.55	-22.11

Sumber: data diolah, 2016

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Adapun simpulan dari penelitian ini adalah ;

- Kabupaten Buleleng sudah dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat Kabupaten Buleleng dengan penyerapan yang meningkat dari tahun 2010 sampai tahun 2015 dengan penyimpangan yang sangat kecil.
- Ditinjau dari rasio kemandirian Kabupaten Buleleng pada tahun 2013 sangat ketergantungan terhadap dana dari pusat sehingga memberikan rasio terkecil pada tahun ini, tetapi Kabupaten Buleleng dapat segera memperbaiki tingkat kemandiriannya di tahun berikutnya 2014 dengan tingkat kemandirian terbesar pada periode pengamatan.
- Ditinjau dari rasio efektivitas, Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 memiliki kemampuan dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Oleh karena itu, pada tahun 2015 pemerintah daerah Kabupaten Buleleng memiliki kemampuan dalam merealisasikan PAD-nya paling tinggi.
- Ditinjau dari rasio efisiensi, Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 memiliki pengeluaran yang dibelanjakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memenuhi dari yang direncanakan, sedangkan pada tahun 2013, Kabupaten Buleleng memiliki pengeluaran yang dibelanjakan sangat sesuai dan memenuhi dari yang ditargetkan. Ini terlihat dari rasio efektifitas terkecil dari periode pengamatan.
- Ditinjau dari rasio aktivitas maka Kabupaten Buleleng memiliki aktivitas yang paling baik dicapai pada tahun 2015 dengan pencapaian rasio aktivitas terkecil, baik untuk rasio belanja rutin terhadap APBD maupun rasio belanja pembangunan terhadap APBD. Aktivitas terburuk dari periode pengamatan terjadi pada tahun 2011 dengan rasio aktivitas terkecil.

- f) Ditinjau dari rasio pertumbuhan maka kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dalam mempertahankan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan (rasio pertumbuhan PAD dan rasio pertumbuhan total pendapatan) terbaik dicapai pada tahun 2012 dan 2014 dan terburuk hingga pencapaian pertumbuhan yang negatif terjadi pada tahun 2015.

### Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah :

- 1) Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu menggali potensi-potensi yang belum dikembangkan.
- 2) Mengevaluasi potensi yang sudah dikembangkan supaya dapat meningkatkan pertumbuhan sumber-sumber pendapatan sehingga nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan pengeluaran yang tentunya dialokasikan untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukry, dan Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi Surabaya Oktober 2003*.
- Elmi, B., 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI- Press.
- Halim, Abdul. 2003. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai)*. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Halim, A., 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIMYKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Nugroho, Fajar. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan PAD Sebagai Variabel Intervening*. Jawa Tengah
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.
- Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 36. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Prakoso, Kesit Bambang 2004. "Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Empirik Di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY". *Jurnal JAAI*, Volume 8 Nomor 2, Hal 54-77.
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Cetakan Pertama Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia. 2000. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta 1999*.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.

Sekaran, U., 2007. *Research Methods for Business*. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Penerbit Salemba.

Sidik, M., 2003. Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional. *Makalah Seminar Nasional, Public Sector Scorecard*. Jakarta.

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2005. Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Bandung:CV Pustaka Setia.